



**HERY  
FIRMANSYAH  
SH-M.HUM**

Dosen Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara



**DAVID  
SURYA  
SH, MH**

Bendahara Umum DPP LBH Perindo

# Kaburnya Napi dari Lapas

Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta menduga ada tiga faktor penyebab lolosnya lima tahanan di lapas Kelas IIB Sleman (Cebongan). Tiga faktor itu yakni sarana-prasarana lapas yang tak memadai, jumlah sumber daya manusia (SDM) yang minim, serta kapasitas lapas yang berlebih.

**M**edia akhir-akhir ini tengah sibuk mengabarkan tentang kaburnya para napi dari sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) seperti Salemba, Cebongan, dan Tulungagung. Permasalahan yang sudah cukup lama menggambaran potret buram wajah pengelolaan lapas di negeri ini. Peristiwa semacam ini bukan yang pertama tapi tentu menja- di harapan kita semua untuk menjadi yang terakhir kalinya.

Guru Besar Hukum UGM Prof Fakultas Hukum UGM Prof Marcus Priyo Gunarto (2013) mengatakan, tingkat keamanan yang rendah di dalam lapas dan rutan dapat memicu berbagai masalah antara lain kaburnya napi; terjadinya keributan/perkelahian antarpenghuni, penghuni dengan petugas; transaksi narkoba; menurunnya kualitas sarana dan prasarana dalam lapas atau rutan. Misalnya aspek sanitasi lingkungan menjadi di bawah standar; dan terganggunya proses pembinaan napi, dan lain sebagainya. Dalam catatan kecil dari Prof. Marcus tersebut jelaslah bahwa rendahnya tingkat keaman- an di lapas masih merupakan persoalan besar yang harus segera dijawab oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi besar yang ber- tanggung jawab langsung dengan

sebagai reevaluasi terhadap se- jumlah program kerja yang te- lah atau akan dijalankan oleh lapas yang akan diselaraskan dengan tujuan pemidanaannya yang dibuat oleh pemerintah. Bahwa tujuan didirikannya lapas dalam spek- trum kontemporer adalah un- tuk dapat menjalankan pola re- integrasi sosial, di mana se- orang yang warga binaan di la- pas, kelak ketika keluar sudah dapat diterima dan berdam- pingan kembali dalam hidup yang layak di tengah-tengah masyarakat. Namun, yang sa- ngat disesalkan adalah hampir tidak meratanya pelatihan yang diberikan kepada petugas lapas dalam rangka menangani per- masalahannya yang ada di dalam lingkungan lapas, sehingga akan menjadi sulit untuk mene- mukakan alat ukur yang tepat bagi pengelolaan lapas yang ber- muara kepada tingkat kesuk- sesaan mendidik warga binaan selama di lapas.

Pemerataan fasilitas serta jumlah SDM di seluruh lapas yang tersebar di wilayah Indo- nesia tidak dapat pula dikatakan memenuhi standar yang memenu- hui kualifikasi standar, sehing- ga hal ini sekaligus akan menjadi bom waktu yang tinggal me- nunggu saat yang tepat untuk memuntahkan persoalannya keluar. Masih banyak ditemu- kan di sejumlah lapas khusus- nya mengenai keamanan yang dilakukan atas bahaya yang mungkin ditimbulkan dari luar, semisal selundupan barang yang dilarang dibawa masuk ke lapas, bahkan untuk ditarang keras digunakan oleh napi di dalam lingkungan lapas masih saja terjadi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Salah satu faktor utam- nya adalah lemahnya pengawas-

kukan *screening* awal atau filter- isasi persoalan tersebut. Hal itu dipicu oleh pengawasan yang di- lakukan terhadap keluar masuk orang dan barang ke dalam lapas yang masih menggunakan pola konvensional kasatmata, bukan dengan bantuan teknologi yang canggih.

Pilihan lain yang dapat di- pertimbangkan adalah dibuka- nya kemungkinan bagi pihak swasta untuk mendirikan dan mengelola lapas. Beberapa ne- gara di dunia seperti Korea Se- latan, Amerika Serikat, dan Ka- nada telah memperbolehkan pi- hak swasta/*independent con- tractor/private contractor* untuk mendirikan dan mengelola la- pas yang didasarkan pada per- janjian antara pemerintah dan pihak swasta tersebut. Perjanji- an itu mengatur sedikitnya me- ngeni tingkat keamanan dan fasilitas yang seharusnya ada dalam lapas.

Berbagai jurnal hukum di luar negeri telah banyak dipu- blikasikan mengenai *private pri- son/private operated prison*. Akuntabilitas, fasilitas yang memadai, tingkat keamanan, pengelolaan secara profesional, serta adanya program-program yang memungkinkan para napi untuk kembali bermasyarakat, adalah hal-hal yang dijadikan pertimbangan ketika pemerin- tah hendak menunjuk pihak swasta untuk mendirikan dan mengelola lapas. Prodakontra terhadap kemungkinan ini hen- daknya dibahas secara akade- mis dan dengan pertimbangan yang menyeluruh. Kaburnya para napi tentu meresahkan masyarakat karena bukan tidak mungkin napi-napi tersebut akan melakukan aksi tindak pidana kembali. Evaluasi pengelolaan

**Salah satu poin penting yang dapat menjadi sebuah pembelajaran adalah kaburnya napi yang menggunakan**